

**RENCANA KERJA (RENJA)
ANGGARAN KECAMATAN BANYUMAS
TAHUN 2023**



**KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

" Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
 15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah:

- 1) Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023;
- 2) Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama tahun 2023.

I.4. SISTEMATIKA

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

menguraikan Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Banyumas tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Banyumas tahun 2022 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2022 sebesar Rp 2.264.083.290,00 terdiri dari belanja operasi Rp 2.224.453.290,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.553.854.050 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 670.599.240 dan modal Rp 39.630.000,00. Dalam pelaksanaannya diperubahan anggaran menjadi Rp 2.602.740.527,00 dengan belanja operasi Rp 2.527.304.027,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.700.007.202,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 827.206.825 dan belanja modal Rp 75.436.500,00. Penyerapan anggaran belanja langsung Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.220.892.136,00 (94,64%) dari total anggaran belanja sebesar Rp. 2.346.562.573,00. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Perkantoran merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (97.16).

Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 4 program dan 23 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi kecamatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- c. Pelaksanaan pembinaan kebijakan kegiatan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan kegiatan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasi, para Kasubbag dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Uraian Tugas dan Fungsi OPD

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ditingkat.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumah tanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas kecamatan.

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan program dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumah tanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

5. Kasi Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep

evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungankomunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral di tingkat kecamatan .

6. Seksi Pelayanan;

Kepala Sub Bagian Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pelayanan dan perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuaistandar pelayanan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pendidikan, sosial,kebudayaan,kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olah raga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan,ketransmigrasian dan bidang agama.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umumserta penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 2.602.740.527,00,- terurai dalam 4 program dan 25 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2021	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	83	83,64	83,46	100	
2.	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	-
3.	Prosentase Kelompok masyarakat dikecamatan yang aktif	80%	80%	80%	100%	
4.	Prosentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Linmas terbina	100%	100%	75%	100%	
6.	Persentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	90%	98%	98%	108,8%	
8.	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	85%	85%	85%	100%	
9.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100%	100%	100%	100%	-

Tabel T-C.30
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas**

No	Indikator	SPM / Stan dar Nasi onal	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata- tan Anali sis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahu n 2020	Tahun 2021 (s/d Tw2)	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	v	v	82	83	83	83	83,46	83,64	83	83	

2	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu		v	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase Kelompok masyarakat dikecamatan yang aktif	V		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	V		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase Linmas terbina			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Persentase pembayaran PBB di Kecamatan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes		v	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banyumas sebagai berikut:

- Belum terpenuhinya secara maksimal aspek kualitas perencanaan
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan
- Belum optimalnya sistem informasi profil daerah
- Belum optimalnya kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan

hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumas. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. SDM Kecamatan Banyumas Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang yang didominasi oleh pendidikan SLTA dan S1. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Banyumas Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di

bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan antara lain:
 - Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
 - Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
 - Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat

Daerah lain;

5. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan;
7. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi

dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banyumas Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Banyumas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Banyumas Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Kecamatan Banyumas Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan umum
2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD
3. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan
4. Meningkatkan pelayanan perkantoran
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perubahan Anggaran tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Perubahan Anggaran dapat dilihat pada lampiran table C-T.31. Perubahan Anggaran tahun 2022 menunjukkan Kecamatan Banyumas memiliki 4 program dan 25 kegiatan.

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
KECAMATAN BANYUMAS
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Perubahan Anggaran Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	5.340.000	0	0	5.340.000	100	5.365.800
Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	5.340.000	0	0	5.340.000	3	5.365.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2		0	0	0	2	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	5.340.000	0	0	5.340.000	3	5.365.800
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100					100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	1.701.897.202	0	0	1.701.897.202	2	1.576.954.050

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Perubahan Anggaran Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	Orang	14	1.680.597.202	0	0	1.680.597.202	14	1.555.654.050
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	4	21.300.000	0	0	21.300.000	4	21.300.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100					100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	3	75.436.500	0	0	75.436.500	3	55.000.000
Pengadaan Alat Pembersih	Jumlah Mesin Rumpit Kantor yang tersedia	Unit							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	6	75.436.500	0	0	75.436.500	2	55.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	5	163.600.000	0	0	163.600.000	5	58.975.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Perubahan Anggaran Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	9	24.750.000	0	0	24.750.000	9	22.950.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	8	11.300.000			11.300.000		8.500.000
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	127.550.000	0	0	127.550.000	1	27.525.000
Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	0			0	0	0
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100					100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	7	194.146.625	0	0	194.146.625	7	210.943.912
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	3	3.886.000	0	0	3.886.000	3	3.686.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	8	32.101.609	0	0	32.101.609	3	31.262.511

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Perubahan Anggaran Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3	6.425.616	0	0	6.425.616	3	3.760.501
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	87.579.200	0	0	87.579.200	12	76.733.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Buah	30	18.274.200	0	0	18.274.200	30	17.159.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	115	45.880.000	0	0	45.880.000	115	78.342.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	318.394.200	0	0	318.394.200	3	291.028.028
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	35.689.080	0	0	35.689.080	12	32.473.708
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	2	4.500.000			4.500.000		6.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	11	278.205.120	0	0	278.205.120	11	252.154.320

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Perubahan Anggaran Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	87.687.000	0	0	87.687.000	1	57.532.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Prizinan Non Usaha	Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani	orang	7500	82.215.000			82.215.000	7500	52.060.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar			5.472.000			5.472.000		5.472.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jenis	2	8.832.000			8.832.000	2	8.832.000
Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	Jenis	12	8.832.000			8.832.000	1	8.832.000
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pilkades	Desa	0	0			0	12	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jenis	2	37.071.000			37.071.000	2	32.286.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	orang	60	8.812.000			8.812.000	60	8.812.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Perubahan Anggaran Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Perencanaan									
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	12	28.259.000			28.259.000	12	18.974.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ke Tertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ke Tertiban Umum	Jenis	3	4.734.000			4.734.000	3	12.734.000
Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan Ketentraman dan ketertiban yang tertangani	persen	100	0			0	100	3.500.000
Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan	Pembinaan Linmas	kali	2	0			0	2	4.500.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Rakor Linmas	kali	2	4.734.000			4.734.000	2	4.734.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Linmas	kali	1	5.602.000			5.602.000	2	
Koordinasi / sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase Pemohon Pelayanan yang terlayani dengan baik	kali	1	5.602.000			5.602.000	2	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2023 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”***. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2023 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan pada ***“Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”***, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kab. Banyumas, membantu Bupati

Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Banyumas Kab. Banyumas Tahun 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Banyumas Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. 3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kab. Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Banyumas dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Kecamatan Banyumas mempunyai 4 program dan 25 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima Kasi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2023 yaitu Rp 2,315,253,290,00 dengan sumber pendanaan APBD Kab sebesar Rp 2,315,253,290,00. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada table T-C.33

Tabel T-C.33
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
 Kecamatan Banyumas
 Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
 Kabupaten Banyumas**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catat an Penti ng	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7															
7	01								2,315,253,290						2,657,739,000
7	01	01							2,198,266,790						2,505,400,000
7	01	01	2.01						5,365,800						6,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyuma, Banyumas, Semua Kelurahan		3 Laporan	5,365,800	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)				6,500,000
7	01	01	2.02						1,676,954,050						1,698,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyuma, Banyumas, Semua Kelurahan		168 Orang/ bulan	1,555,654,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,675,000,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kab. Banyuma, Banyumas, Semua Kelurahan		4 Dokumen	21,300,000	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)				23,000,000
7	01	01	2.06						210,943,912						255,900,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan		2 Paket	3,886,000	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)				5,400,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan		2 Paket	31,262,511	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)				35,500,000

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	2 Paket		3,760,501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,500,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	2 Paket		76,733,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	12 Paket		17,169,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	105 Laporan		78,342,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,000,000			80,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	4 Unit		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						291,028,028			327,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	12 Laporan		32,473,708	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43,500,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	3 Laporan		6,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	12 Laporan		252,154,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			276,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58,975,000			137,600,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	9 Unit		22,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000

7	0 01	2.09	06	Pemeliharaan Peraiatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peraiatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	11 Unit		8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,500,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	1 Unit	27,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				63,134,500					89,939,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5,602,000					6,439,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat dan Instansi Vertikal terkait	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	6 Laporan	5,602,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,439,000
7	01	02	2.04		Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				57,532,500					83,500,000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	3 Laporan	52,060,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				76,500,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang diimpahkan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	9 Laporan an	5,472,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				32,286,000					34,900,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				32,286,000					34,900,000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan		8,812,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	2 Dokumen 0 Dokumen	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,500,000

7	0103.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah kecamatan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	4 Laporan	18,974,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,400,000	
7	01.0.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					12,734,000					17,900,000
7	0104.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8,234,000					11,500,000
7	0104.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	4 Laporan	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,500,000	
7	0104.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	4 Laporan	4,734,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,000,000	
7	0104.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4,500,000					6,400,000
7	01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	4 Laporan	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,400,000	
7	01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					8,832,000					9,600,000
7	01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					8,832,000					9,600,000
7	01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	7 Dokumen	8,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,600,000	
						TOTAL	2,315,253,290				2,657,739,000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	12 Paket	17,159,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	105 Laporan	78,342,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	4 Unit	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				291,028,028	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	12 Laporan	32,473,708	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	3 Laporan	6,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	12 Laporan	252,154,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58,975,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	8 Unit	22,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	11 Unit	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kelurahan	1 Unit	27,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				63,134,500	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5,602,000	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Banyumas tahun 2023. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tahun 2023, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Banyumas dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banyumas menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.

Banyumas, Agustus 2022
CAMAT BANYUMAS

KECAMATAN
BANYUMAS

OKA YUDHISTIRA F, S.STP, M.Si
4NP.19811212 200012 1 003